

KEWARGANEGARAAN

Volume 22 : Nomor 01, Juni 2014

Dakwah Melalui Media Virtual
Hapni Laila Siregar

Korelasi Ajaran Kristiani Dengan Pelaksanaan Paulak Une
dan Manikkir Tangga Dalam Adat Batak Toba
(Salah Satu Bagian Dari Kekayaan Adat Batak Toba Yang Ditinggalkan)
Mangido Nainggolan

Pengembangan Materi Ajar Membaca Berwawasan Multikultural
Sebagai Upaya Peningkatan Mutu Pendidikan di Sekolah Dasar
Syahril Siregar

Enam Karakter Mahasiswa Unimed;
Intelektual Muda Calon Pemimpin Masa Depan
Hodriani

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
Dalam Sistem Hukum Indonesia
Anggiat P. Simamora

Afiliasi Politik Etnis Tionghoa di Kota Medan
Dalam Pemilihan Gubernur Sumatera Utara 2013
Budi Ali Mukmin Sarumpaet, Ramsul Nababan, Prayetno

Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Umum Legislatif
Bakhrul Khair Amal

Diterbitkan oleh :
Jurusan Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan
Fakultas Ilmu Sosial- Universitas Negeri Medan

ISSN 1693 – 7287

JURNAL KEWARGANEGARAAN

Penerbit

Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan

Pembina

Rektor Universitas Negeri Medan
Dekan FIS Unimed

Penanggung Jawab

Ketua Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Dewan Penyunting Pakar

Djanius Djamin, Prof. Dr. (Universitas Negeri Medan, Medan)
Abdul Muin Sibuea, Prof. Dr. (Universitas Negeri Medan, Medan)
Idrus Affandi, Prof. Dr. (Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung)
Ridwan A. Sani, Dr. (Universitas Negeri Medan, Medan)
Warsono, Prof. Dr. (Universitas Negeri Surabaya, Surabaya)

Ketua Penyunting

Drs. Buha Simamora, SH., MH

Pelaksana Penyunting

Drs. Suady Husein, SH., MS

Drs. Liber Siagian, M.Si

Dra. Yusna Melianti, MH

Drs. Halking, M.Si

Ramsul Nababan, SH

Sekretaris Penyunting

Parlaungan Gabriel Siahaan, SH., M.Hum

Alamat Redaksi :

Jurusan PP-Kn FIS UNIMED

Jl. Williém Iskandar Pasar V Medan K. Pos. 20221

Telp (061) 6625973 – Fak (061) – 6614002

E-mail PPKn@Plasa.com

Jurnal Kewarganegaraan : terbit dua kali dalam setahun pada bulan Juni dan Nopember. Penyunting mengundang para akademisi, guru dan peminat kajian kewarganegaraan untuk mengirim naskah, baik dalam bentuk artikel ilmiah maupun hasil penelitian tentang Pendidikan Kewarganegaraan dari kategori Tajuk Rencana Penelitian Pendidikan dan Pembelajaran, Analisis Hukum dan Wacana Demokrasi dan politik. Naskah yang dikirim agar mengikuti pedoman penulisan “Jurnal Kewarganegaraan”.

Opini yang dimuat dalam jurnal ini tidak mewakili pendapat resmi penyunting

Pengantar Redaksiiii



Tajuk Rencana Penelitian Pendidikan dan Pembelajaran

 Dakwah Melalui Media Virtual Hapni Laila Siregar	1
 Korelasi Ajaran Kristiani Dengan Pelaksanaan Paulak Une dan Manikkir Tangga Dalam Adat Batak Toba (Salah Satu Bagian Dari Adat Batak Toba Yang Ditinggalkan) Mangido Nainggolan	13
 Pengembangan Materi Ajar Membaca Berwawasan Multikultural Sebagai Upaya Peningkatan Mutu Pendidikan di Sekolah Dasar Syahril Siregar	31
 Enam Karakter Mahasiswa Unimed; Intelektual Muda Calon Pemimpin Masa Depan Hodriani	57

Analisis Hukum

 Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Dalam Sistem Hukum Indonesia Anggiat P. Siomamora	69
--	----

Wacana Demokrasi dan Politik

 Afiliasi Politik Etnis Tionghoa di Kota Medan Dalam Pemilihan Gubernur Sumatera Utara 2013 Budi Ali Mukmin Sarumpaet, Ramsul Nababan dan Prayetno	85
 Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Umum Legislatif Bakhrul Khair Amal	104

Pengantar

Redaksi

Jurnal Kewarganegaraan setiap diterbitkan mengacu kepada tiga katagori, yaitu Tajuk rencana Penelitian Pendidikan dan Pembelajaran, Analisis Hukum dan Wacana Demokrasi dan politik. Dalam setiap terbit Jurnal Kewarganegaraan memuat tema sesuai dengan kategori yang telah ditentukan. Dengan diterbitkannya Jurnal Kewarganegaraan Volume 22 Nomor 01, Juni 2014 menandakan bahwa "Jurnal Kewarganegaraan" Jurusan PP-Kn Fakultas Ilmu Sosial - Unimed telah terbit sebanyak 22 kali, dan selalu rutin menerbitkan jurnal setiap tahun dua kali yaitu pada bulan Juni dan Nopember.

Pada terbitan kali ini menampilkan tujuh tulisan dan karya ilmiah yang menitikberatkan pada persoalan Penelitian Pendidikan dan Pembelajaran, Hukum, Demokrasi dan Politik.

Rubrik "**Tajuk Rencana Penelitian Pendidikan dan Pembelajaran**" yang membahas tentang Dakwah Melalui Media Virtual yang diangkat oleh *Hapni Laila Siregar*, secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa Seiring dengan kemajuan teknologi, metode dan strategi dakwah pun mengalami perkembangan. Kini dakwah tidak lagi cukup dilakukan secara sederhana yaitu dengan berceramah di masjid-masjid, majelis taklim, sekolah dan sebagainya, tapi mulai memanfaatkan kemajuan teknologi khususnya internet. Dakwah melalui internet merupakan suatu inovasi terbaru dalam syiar Islam yang perlu terus dikembangkan. Ada beberapa keuntungan yang didapat dari dakwah melalui internet ini, yaitu: (1) Tidak tergantung waktu dan tempat. Dakwah bukan lagi kegiatan yang dilakukan dalam periode waktu tertentu yang terbatas tapi dakwah menjadi kegiatan yang bisa terus terjadi selama 24 jam. Informasi mengenai Islam juga bisa didapatkan kapan dan dimana saja. (2) Cakupan yang luas. Informasi yang disebarkan di internet dapat diakses oleh semua orang karena cakupan internet adalah seluruh dunia. (3) Pendistribusian yang cepat. Internet merupakan media penyebaran informasi yang tercepat saat ini. Dengan berdakwah virtual maka hanya dalam hitungan detik, materi dakwah yang baru kita tuliskan sudah tersebar kemana-mana. (4) Keragaman cara penyampaian. Dengan bentuk keragaman yang ditawarkan internet, mulai dari bentuk tulisan sampai ke bentuk audio visual yang menarik, maka cara dakwah yang ditempuh bisa beragam.

Sedangkan *Mangido Nainggolan* membahas tentang Korelasi Ajaran

Korelasi Ajaran Kristiani Dengan Pelaksanaan Paulak Une & Manikkir Tanga Dalam Adat Batak Toba (Salah Satu Bagian dari Kekayaan Adat Batak Toba yang Ditinggalkan), secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa, Hakikat manusia adalah kebudayaan, mengembangkan kebudayaan adalah tugas yang pertama yang diterima dari Allah. Kebudayaan adalah pola hidup untuk kemuliaan Allah dan kebaikan moralitas bagi manusia. pengembangan dan pelaksanaan unsur-unsur kebudayaan dilakukan dalam hubungan tanggung-jawab untuk memuliakan Tuhan (Mazmur 8;2,10). Namun dalam kenyataannya manusia sebagai makhluk berbudaya telah menggunakan budaya tersebut untuk memberontak terhadap Allah. Manusia telah mengembangkan pola hidup dan budayanya menurut keinginannya sendiri sehingga menghilangkan identitas kesegambarannya dengan Allah. Peningkaran kesegambaran itu pada akhirnya menghasilkan kemerosotan moral bagi manusia itu sendiri yang mengakibatkan hilangnya nilai-nilai etika diantara sesama manusia. Selanjutnya, **Syahril Siregar** membahas tentang Pengembangan Bahan Ajar Membaca Berwawasan Multikultural Sebagai Upaya Peningkatan Mutu Pendidikan di sekolah Dasar, secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa, Pengembangan bahan ajar berupa model materi ajar membaca berwawasan multikultural dengan memanfaatkan *Information Communication and Technology (ICT)* sebagai media pembelajaran sangat efektif dalam peningkatan mutu pendidikan di Sekolah Dasar. Selanjutnya **Hodriani**, mengangkat issue tentang Enam Karakter Mahasiswa Unimed; Intelektual Muda Calon Pemimpin Masa Depan, secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa, Mahasiswa merupakan aset bangsa, intelektual muda dan calon pemimpin masa depan. Unimed berusaha menciptakan iklim akademik yang dapat diterima dan dimiliki oleh mahasiswa-mahasiswa Unimed yang berasal dari berbagai suku dan budaya (multikultural). Ada enam nilai utama yang harus dimiliki oleh mahasiswa yaitu dapat dipercaya, jujur (*trustworthiness*), Berlaku hormat (*respect*), Tanggung jawab (*responsibility*), Berlaku adil (*fairness*), Kepedulian (*caring*) dan Berperilaku kewargaan (*citizenship*).

Untuk rubrik "**Analisis Hukum**" dibahas oleh **Anggiat P. Simamora**, yang mengangkat Issue berkaitan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Dalam Sistem Hukum Indonesia, secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa, keberadaan *Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)* dalam sistem hukum Indonesia tidak terlepas dari satu sub sistem dari sistem hukum Indonesia. Salah satunya, KPK wajib mematuhi segala aturan perundang-undangan Indonesia termasuk UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.

Sedangkan rubrik “**Wacana Demokrasi dan Politik**” yang di tulis oleh **Budi Ali Mukmin Sarumpaet, Ramsul nababan, dan Prayeno**, mengangkat Issu tentang Afiliasi Politik Etnis Tionghoa di Kota Medan Dalam Pemilihan Gubernur Sumatera Utara 2013, secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa, Kota Medan merupakan ibu kota Provinsi dari Sumatera Utara yang dikenal memiliki tingkat pluralitas yang tinggi baik dari segi penyebaran etnis maupun dari segi agama. Tidak adanya mayoritas etnis yang berada di kota Medan ternyata memberikan fenomena tersendiri dan menarik untuk diteliti dimana sering terjadi penggunaan politik yang berbasiskan etnis ketika dihadapkan dalam dinamika kontestasi politik lokal untuk meraih pucuk kekuasaan. Meskipun sebagai etnis minoritas, Tionghoa Medan memiliki keunggulan tersendiri seperti sebagai etnis yang memiliki modal kapital besar dalam menggerakkan perekonomian di kota Medan dan sebagai etnis yang menempati urutan terbesar ketiga setelah etnis Jawa dan Batak. Sedangkan, **Bakhrul Khair Amal**, membahas tentang Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Umum Legislatif, secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa, Partisipasi pemilih dalam setiap pagelaran pemilu selalu memprihatinkan. Angka golongan putih (golput) masih terus meningkat di setiap pemilu yang digelar di Indonesia. Oleh karenanya tingkat partisipasi dalam pemilihan masyarakat sangat rendah.

Penyunting senantiasa mengharapkan kepada para akademisi, guru dan peminat kajian kewarganegaraan untuk berpartisipasi mengirimkan naskah, baik dalam bentuk artikel ilmiah maupun hasil penelitian tentang pendidikan kewarganegaraan dengan kategori Tajuk rencana Penelitian Pendidikan dan Pembelajaran, Analisis Hukum dan Wacana Demokrasi dan politik.

Harapan kami, Jurnal Kewarganegaraan ini dapat menjadi bacaan ilmiah bagi para penulis dan pembaca pada umumnya, untuk menambah wawasan tentang kewarganegaraan. Kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada para penulis dan tim penyunting yang telah bekerja keras, sehingga Jurnal Kewarganegaraan ini dapat diterbitkan.

Redaksi

AFILIASI POLITIK ETNIS TIONGHOA DI KOTA MEDAN DALAM PEMILIHAN GUBERNUR SUMATERA UTARA 2013*

Oleh : Budi Ali Mukmin Sarumpaet**
Ramsul Nababan***
Prayetno****

Abstract

Medan has a high level of plurality both in spreading of ethnic and religion. The absence of ethnic majority in Medan city causes the using of politics based on ethnic often happens in the local politics to get the biggest power. Although as minority, Medan Tionghoa ethnic has special superiority; such as having a huge amount of capital to run business in Medan city and has position as the third biggest ethnic after Java and batak ethnic. This research used the approach of political anthropology to see how the affiliation of Tionghoa ethnic in the election of North Sumatera governor in 2013. The result of this research shows that the affiliation of Tionghoa ethnic in Medan city in the election of North Sumatera governor was directed to two pairs; they are the pair of Gatot Pujo Nughroho and Tengku Erry Nuradi and the pair of Efendi Simbolon and Jumiran Abdi. The politics affiliation of Tionghoa ethnic in the election of North Sumatera governor generally based on two reasons. The first, the politics affiliation of Tionghoa ethnic is related to the nearness of ideology of the political party and the spread of Tionghoa ethnic who have position in that party. The second, the politics of kinship, because of both the kinship based on the similarity of organization, and the kinship as businessmen, as well as the kinship because of the same clan. All this kinship becomes the foundation for the Tionghoa ethnic to choose the pair of Gatot Pujo Nughroho and Tengku Erry Nuradi and the pair of Efendi Simbolon and Jumiran Abdi.

Keywords : *Politic Afiliation, Political Khinship, Tionghoa Etnic Politic*

PENDAHULUAN

Medan merupakan Ibu Kota Provinsi Sumatera Utara dikenal memiliki konfigurasi etnis yang beragam. Sebahagian kalangan optimis bahwa pasca Orde Baru, Kota Medan akan menjajikan sebuah pembangunan dan konsolidasi demokrasi yang baik. Harapan akan terciptanya pembangunan dan konsolidasi

* Tulisan ini merupakan hasil penelitian tahun 2014

** **Budi Ali Mukmin Sarumpaet, S.I.P., M.A** adalah Dosen Pada Jurusan PP-Kn Fakultas Ilmu Sosial - Unimed

*** **Ramsul Nababan SH** adalah Dosen Pada Jurusan PP-Kn Fakultas Ilmu Sosial - Unimed

**** **Prayetno, S.I.P., M.Si** adalah Dosen Pada Jurusan PP-Kn Fakultas Ilmu Sosial - Unimed

demokrasi itu mulai terlihat ketika masing-masing etnis (termasuk etnis Tionghoa) kini mendapatkan kesempatan yang sama untuk dapat menggunakan hak-hak politiknya. Hanya saja, prospek pembangunan demokrasi di Kota Medan sangat mencemaskan. Masing-masing etnis yang tidak mendapatkan ruang kebebasan pada masa Orde Baru, justru kembali bangkit dan menjadikan liberalisasi politik sebagai arena pertarungan untuk mendapatkan sebuah pengakuan dan pengukuhan politik di tengah masyarakat yang plural. Ada kecenderungan bahwa setelah rezim Orde Baru turun, etnisitas sering kali menjadi dasar legitimasi sejarah sosial politik untuk memperebutkan kekuasaan dalam dinamika politik lokal (Lingkaran Survei Indonesia 2008:09). Argumentasi tersebut semakin kuat ketika penelitian Hadiz menemukan bahwa setelah jatuhnya rezim Orde Baru, dinamika politik lokal di Kota Medan tidak menjamin bahwa masa transisi demokrasi telah berjalan seperti apa yang diharapkan. Dalam pandangannya dia melihat telah terjadi sebuah proses anti klimaks yang terjadi di Sumatera Utara pasca jatuhnya rezim Orde Baru (Hadiz 2005:249 dan 2003).

Geliat etnis Tionghoa untuk merambah dunia politik dalam dinamika politik lokal di Medan semakin menguat. Bangkitnya semangat etnis Tionghoa untuk berpolitik berawal ketika pemerintah mencabut kebijakan yang selama ini mengekang hak-hak politik etnis Tionghoa. Liberalisasi Politik yang bergulir sejak jatuhnya rezim Orde Baru mulai dimanfaatkan etnis Tionghoa untuk kembali membangun kekuatan politik yang berbasis etnis.

Dalam dinamika politik lokal di Kota Medan, keterlibatan etnis tertentu bukan merupakan sebuah pemandangan yang baru. Pemilihan Gubernur Sumatera Utara pada tahun 2013 sebenarnya merupakan pengulangan dari episode pemilihan Gubernur Sumatera Utara periode sebelumnya yang dimenangkan oleh pasangan Syamsul Arifin dan Gatot Pujonugroho yang didukung penuh oleh etnis Jawa dan Melayu.

Di Kota Medan, cara yang ditempuh etnis Tionghoa untuk memanfaatkan liberalisasi politik adalah menduduki jabatan-jabatan politik

dengan mengusung beberapa para wakil dari etnis Tionghoa untuk berkompetisi dalam berbagai kontestasi politik lokal seperti dalam pemilihan anggota legislatif ataupun dalam pemilihan kepala daerah. Sejak jatuhnya rezim Orde Baru, keterlibatan etnis Tionghoa dalam dinamika politik di Kota Medan cenderung mengalami peningkatan. Jika pada pemilihan anggota legislatif tahun 2004, Tionghoa di Medan hanya mengirimkan 5 wakilnya untuk bersaing menjadi anggota legislatif dan belum berhasil menempatkan wakilnya, maka pemilihan anggota legislatif tahun 2009 etnis Tionghoa telah berhasil mengirimkan 6 wakilnya untuk duduk menjadi anggota legislatif di Kota Medan.

Pemilihan gubernur Sumatera Utara bisa dikatakan mempunyai kerumitan tersendiri yang sangat berbeda dengan pilkada-pilkada yang ada di seluruh daerah di Indonesia. Majemuknya komposisi kota Medan memberikan efek yang besar terhadap isu yang berkembang dalam pemilihan gubernur yang untuk pertama kali dilaksanakan secara langsung. Ada tiga isu yang berkembang pada pemilihan Gubernur Sumatera. *Pertama* adalah berkaitan tentang agama. Sentimen agama telah lama menjadi isu sentral dalam sejarah pemilihan kepala daerah yang ada di kota Medan.

Isu yang *kedua* adalah persoalan etnis. Pertanyaan yang selalu muncul adalah, etnis mana yang berhak untuk memimpin Sumatera Utara? Hampir dalam kurun waktu yang lama Kota Medan dinaungi sebuah anekdot nyata yang dikenal dengan '*Rehap Lunas*' sebagai singkatan dari Siregar, Harahap, Lubis dan Nasution yang selalu menjadi pemegang kekuasaan (Nuryanti 2004:208). Perlahan-lahan isu seperti ini mulai ditumbangkan dengan naiknya sebahagian beberapa calon yang berlatar belakang dari etnis Jawa, Melayu, maupun dari Tionghoa. Yang menjadi catatan tersendiri adalah bahwa isu ini hampir mempunyai tingkat sensitifitas yang hampir sama dengan isu agama yang bisa saja memunculkan sebuah konflik bersifat komunal seperti apa yang terjadi pada pemilihan kepala daerah di Kalimantan Barat.

Isu *ketiga* adalah isu yang menyangkut persoalan putra daerah. Perubahan mekanisme dalam sistem pemilihan kepala daerah yang dilakukan secara langsung dan tidak lagi melalui mekanisme DPRD pada tahun 2005 memberikan sumbangan besar atas meningkatnya isu putra daerah. Dari proses pemilihan secara otomatis akan berdampak langsung terhadap penciptaan kompetisi terbuka dalam mewujudkan konsolidasi demokrasi di tingkat lokal. Maka dari itu tidak bisa dipungkiri bahwa pencitraan politik untuk menaikkan elektabilitas dalam pemilihan kepala daerah sering menggunakan isu 'putra daerah' sebagai bahan kampanye untuk menggerakkan basis pemilih.

RESEARCH QUESTION

Sebagai etnis terbesar ke-3 setelah etnis Jawa dan Batak, tentu saja etnis Tionghoa memiliki kontribusi besar sebagai *vote getter* dari beberapa pasangan Gubernur/Wakil Gubernur meskipun tak seorangpun dari internal etnis Tionghoa maju menjadi kandidat Gubernur dan Wakil Gubernur. Landasan inilah yang menarik untuk diteliti untuk melihat ke-arahmana afiliasi politik etnis Tionghoa dalam pemilihan Gubernur Sumatera Utara pada tahun 2013?.

KERANGKA BERFIKIR

Afiliasi politik sebenarnya memiliki hubungan yang erat kaitannya dengan perilaku politik. Indikasi ini dapat dilihat dari adanya keputusan seseorang pemilih untuk memutuskan pilihan politik dalam setiap kontestasi politik. Perilaku politik adalah semua perilaku manusia baik sebagai individu sebagai pejabat pemerintah maupun masyarakat yang berkaitan dengan proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik (Halking dan Budi 2013:67). Keputusan politik itu berkaitan kebijakan dan kebaikan bersama yang dibuat oleh pemerintah dan dalam pembuatan dan pelaksanaan keputusan itu memerlukan kekuasaan politik untuk memperjuangkan kepentingannya dan biasanya terjadi konflik (Halking dan Budi 2013:67).

Untuk mengkaji perilaku politik terdapat tiga unit analisis yakni, individu sebagai aktor politik, agregasi politik, dan tipologi kepribadian politik

(Surbakti 2007; 132). Dalam kategori kateri individu sebagai aktor politik meliputi aktor politik (pemimpin), aktivis politik dan individu warga negara biasa. Dalam hal agregasi maksudnya adalah individu aktor politik secara kolektif, seperti kelompok kepentingan, birokrasi, partai politik, lembaga-lembaga pemerintah dan bangsa. Sedangkan yang berkaitan tentang tipologi kepribadian politik hal ini sangat berkaitan dengan tipe-tipe kepribadian pemimpin otoriter, machiavelist dan demokrat.

Dengan mengkombinasikan ketiga pendekatan tersebut di atas akan dihasilkan sebuah model tentang faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku politik individu aktor politik sebagai berikut (Surbakti dalam Halking dan Budi 2013:68). **Pertama**, lingkungan sosial politik tak langsung, seperti sistem politik, sistem ekonomi, sistem budaya, dan media masa. **Kedua**, lingkungan sosial politik langsung yang mem-pengaruhi dan membentuk kepribadian aktor, seperti keluarga, agama, sekolah, dan kelompok pergaulan. **Ketiga**, struktur kepribadian yang tercermin dalam sikap individu. **Keempat**, lingkungan sosial politik langsung berupa situasi yaitu keadaan yang mempengaruhi aktor secara langsung, ketika hendak melakukan suatu kegiatan, seperti cuaca, keadaan keluarga, keadaan ruang, kehadiran orang lain, suasana kelompok, ancaman dalam segala bentuknya.

Pemilihan Kepala Daerah yang dilakukan secara langsung diharapkan mampu mempercepat pembangunan demokrasi di ranah lokal. Selain mempercepat pembangunan demokrasi lokal, pemilihan kepala daerah juga diharapkan dapat mempercepat proses pembangunan disuatu daerah. Pemilihan kepala daerah secara langsung telah diatur dalam UU N0 32 tahun 2005 tentang pemilihan kepala daerah secara langsung.

Pemilihan kepala daerah merupakan elemen penting sebagai sarana pembelajaran demokrasi bagi rakyat Indonesia yang akan memperkuat proses otonomi daerah. Salah satu tolak ukur suksesnya otonomi daerah adalah terpilihnya pemimpin lokal yang dipilih secara langsung dan demokratis. Semakin baik pemimpin yang dihasilkan melalui mekanisme pemilihan kepala

daerah secara langsung, maka kesejahteraan masyarakat akan dapat dengan mudah untuk diwujudkan.

Agustino memberikan sebuah argumentasi bahwa pemilihan kepala daerah memberikan beberapa keuntungan jika mekanisme pemilihan pemimpin lokal ini dilakukan dengan praktek demokratis (Agustino 2010: Vol 37:92). **Pertama**, pemilihan kepala daerah secara langsung akan berwujud legitimasi politik pemimpin. Legitimasi politik tercapai karena mendapat dukungan secara penuh oleh masyarakat yang langsung memilih. **Kedua**, pemilihan kepala daerah yang dilakukan secara langsung akan mewujudkan *local accountability*. Persoalan *accountability* ini berkaitan tentang tanggung jawab seseorang pemimpin untuk mendapatkan legitimasi politik dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah. **Ketiga**, adalah kesinambungan dari tercapainya *local accountability* yakni tercapainya keseimbangan *checks and balances* antara lembaga-lembaga negara yang berujung pada pemberdayaan masyarakat lokal. **Keempat**, pemilihan kepala daerah secara langsung akan dapat meningkatkan kesadaran politik masyarakat dalam hal partisipasi politik.

Keterlibatan etnis dalam ranah politik sebenarnya bukanlah sesuatu hal yang baru. Dekade 1970/1980-an di negara-negara Benua Afrika seperti Nigeria, Somalia, kekuatan etnik mempunyai peranan penting dalam hal penentuan jabatan-jabatan politik. Untuk di Indonesia, geliat etnis untuk masuk dalam ranah politik praktis terjadi setelah liberalisasi politik yang bergulir sejak tahun 1998. Liberalisasi politik menjadi titik awal *-terminus a quo-* (Gaffar:1999) yang mengawali transisi politik dari penguasa otoriter yang selama ini telah membelenggu hak-hak individual ataupun kelompok tertentu.

Bangkitnya politik etnis dalam pilkada dapat dimaknai dari tidak adanya kepastian demokrasi di tingkat lokal. Dengan kata lain, demokrasi juga memaksa munculnya sebuah kompetisi yang keras untuk dalam hal perebutan kekuasaan. Meminjam istilah yang digunakan oleh Parsudi Suparlan yang tertuang dalam karya Bima Sugiarto bahwa mobilisasi jaringan etnis memang

sengaja diciptakan untuk memenangkan sebuah persaingan dalam hal perebutan kekuasaan.

Ada beberapa faktor mengapa tarikan politik etnis semakin kuat dalam sistem pemilihan kepala daerah. **Pertama**, adalah aturan main yang tertuang dalam UU No 32/2004. UU tersebut mengisyaratkan adanya kebebasan bagi setiap individu ataupun kelompok tertentu untuk bebas mengekspresikan hak-hak politiknya. Pada masa Orde Baru kepentingan-kepentingan kelompok etnis sengaja diminimalkan dari berbagai kepentingan politik, akan tetapi setelah rezim mulai mengalami transisi demokrasi, kelompok-kelompok etnis akan mulai menguat dan ingin menuntut hak-hak dasar politiknya. Dengan kata lain bahwa sistem politik lah yang menciptakan ruang bagi etnis untuk masuk dalam ranah-ranah politik. Fenomena ini sebenarnya telah lama diisyaratkan oleh Cohen yang mengatakan bahwa etnis sangat dekat dengan ranah kekuasaan, karena pada dasarnya kelompok etnis tertentu akan terus memperjuangkan eksistensinya ditengah ketidak pastian di masyarakat yang plural baik dalam perluasan ekonomi dan politik yang mampu menaikkan derajat etnis tertentu (Cohen: 1996).

Kedua, ketidakmampuan partai politik di daerah untuk menjalankan fungsi sebagai mana mestinya terkhusus dalam hal *civic education* dan pola *recruitmen politic* nya. Ada kesan bahwa partai politik hanya berfungsi sebagai kendaraan untuk meloloskan kandidat tertentu dalam momen pilkada. Partai politik justru mencari elit-elit politik dari kalangan selebritis ataupun mencaplok elit politik di daerah yang memiliki basis jejaring-jejaring kekerabatan primordial dari paguyuban-paguyuban kelompok tertentu tanpa menghiraukan kualitas dan kapabilitasnya kepemimpinannya. Tak ayal bila saat ini paguyuban-paguyuban di daerah yang memiliki jaringan sampai lapisan bawah masyarakat menjadi primadona pada saat momen pilkada berlangsung. **Ketiga**, adalah lemahnya regulasi UU dari No 32/2004 yang tidak memuat ketentuan yang tegas mengenai batasan dan sanksi hukuman ketika munculnya isu-isu rasialis dalam setiap pilkada.

Eriksen mengatakan bahwa etnis merupakan sebuah simbol yang terbentuk dari adanya kesamaan, baik segi bahasa, sistem kepercayaan, adat istiadat, yang dapat di gunakan dalam hubungan sosial dengan anggota yang berbeda. Adanya sebuah proses hubungan dengan anggota lain merupakan eksistensi dari sebuah etnis, apabila hal ini tidak terpenuhi sangat berat rasanya bahwa sebuah pelabelan etnis itu akan muncul (Eriksen 1993:12). Lalu bagaimana keterkaitan antara etnis dan politik, sehingga memunculkan sebuah politik etnis? Untuk definisi politik etnis Eriksen mengungkapkan argumentasinya;

Politik etnis adalah upaya untuk mencapai apa yang menjadi tujuan dari etnis tertentu yang mengandalkan ikatan primordial, adanya jalinan emosional, persamaan agama, kebudayaan, bahasa, asal-usul sejarah yang di jadikan sebagai acuan perilaku politiknya...Ketika terjadi sebuah interaksi hubungan sosial yang terdiri dari etnis berbeda, di sinilah peranan politik identitas etnis itu mulai muncul, karena pada dasarnya masing-masing kelompok etnik memiliki ideologi dan memiliki berbagai macam kebiasaannya sesuai dengan asal muasal daerahnya (2002:12-13 dan 156 lihat juga Mukmin, Ali, Budi 2009:15).

Di lain pihak Cohen justru lebih tegas untuk mengatakan bagaimana politik etnis itu dapat muncul. Kota Ibadan, Nigeria yang memiliki banyak suku dan etnis adalah obyek penelitian Cohen. Dia mengatakan di Kota Ibadan, penonjolan karakter ke sukubangsaan semakin kuat dan mampu mempengaruhi negara. Sebelum Nigeria merdeka, suku Hausa adalah suku yang mampu menjadi ujung tombak dalam hal perekonomian. Perubahan terjadi ketika Nigeria mencoba menyatukan keragaman etnis yang ada setelah negara tersebut mendapatkan kemerdekaan. Kemunduran adalah hal yang di rasakan oleh suku Hausa ketika Nigeria berupaya untuk mempersatukan keragaman etnis yang ada. Upaya yang di lakukan suku Hausa untuk bangkit dari keterpurukan adalah membangun rasa solidaritas sifat kesukubangsaan yang di gunakan untuk menyatukan mereka sebagai upaya pengembalian kejayaan masa lalu (Cohen dalam Suparlan 1989:10). Lebih jelasnya Cohen mengatakan bahwa:

Etnis merupakan sebuah fenomena politik, karena dalam etnis terkandung nilai-nilai tradisional yang memiliki karakter tertentu, dan dari karakteristik yang dimiliki etnis dapat digunakan sebagai mekanisme dari penyesuaian politik ketika terjadi interaksi di antara beberapa identitas etnis (Cohen 1996 :83-84 lihat juga Mukmin, Ali, B 2009:17).

Dari pemaparan yang diungkapkan oleh Cohen, politik etnis itu akan muncul ketika telah terjadi hubungan antara etnis yang ada. Adanya sifat untuk memperjuangkan eksistensinya dalam hal perluasan ekonomi, pendidikan, dan hal lainnya di rasakan akan mampu menaikkan derajat dari etnis tersebut. Sepertinya Cohen mengatakan bahwa kelompok etnisitas yang berada di sebuah negara sebenarnya sangat dekat kekuasaan ranah kekuasaan. Argumentasi Cohen di dasarkan pada apa yang terjadi di Ibadan di mana etnisitas merupakan bagian dari alat kekuasaan negara untuk mencapai kepentingan-kepentingan tertentu (Cohen 1974:xviii). Jika kita menyetujui argumen yang di kembangkan Cohen maka, politik etnis merupakan hal alamiah yang terjadi di negara-negara yang memiliki banyak etnis, agama, kebudayaan dan sebagainya. Keterlibatan etnis dengan politik terjadi ketika etnis sebagai kelompok manusia yang mempunyai kebudayaan sama, dan berkembang di ranah biologis akan menuju ranah kebudayaan dan pada akhirnya bermuara pada ranah politik (Habib 2004:15).

Terlepas dari beberapa persoalan tersebut, hal yang menarik untuk di lihat dari pendapat Cohen dan Eriksen adalah bagaimana munculnya semangat primordial yang di kemas menjadi politik etnis sebagai acuan untuk berpolitik. Jika di sandingkan dalam dinamika politik kota Medan maka hal ini sangat menarik. Peluang bagi seluruh etnis untuk saling berkompetisi dalam pencapaian kekuasaan semakin terbuka di tengah-tengah tidak adanya etnis yang menjadi mayoritas.

Indonesia adalah negara yang memiliki ragam etnik. Mau tidak mau negara akan memberikan peluang terhadap eksistensi dari semua etnis yang ada. Untuk konteks etnis Tionghoa, terlepas kedatangan mereka sebagai kelompok

migran sebagai dampak dari kolonialisme Belanda, keberadaan etnis Tionghoa di Indonesia telah menjadi bagian sejarah bangsa Indonesia.

AFILIASI POLITIK ETNIS TIONGHOA KOTA MEDAN DALAM PEMILIHAN GUBERNUR SUMATERA UTARA TAHUN 2013

Pemilihan Gubernur Sumatera Utara pada tahun 2013 telah selesai diselenggarakan dan Sumatera Utara telah menentukan bahwa pasangan no urut 5 yakni pasangan Gatot Pujo Nugroho dan Tengku Erry Nuradi menjadi pemenang dari perhelatan demokrasi di Sumatera Utara. Berikut ini adalah rekapitulasi hasil pemenang dalam pemilihan Gubernur Sumatera Utara pada tahun 2013.

Rekapitulasi Hasil Pemilihan Gubernur Sumatera Utara Tahun 2013

No	Nama Calon Gubernur/Wakil Gubernur Sumatera UTara	Perolehan Suara
01	Gotot Pujo Nugroho dan Tengku Erry Nuradi	1.604.337 (33 %)
02	Efendi Simbolon dan Jumiran Abdi	1.183.187 (24,34 %)
03	Gus Irawan Pasaribu dan Soekirman	1.027.433 (21,13 %)
04	Amri Tambunan dan RE Nainggolan	594.414 (12,23 %)
05	Chairuman Harahap dan Fadly Nurzal	452.096 (9,30 %)

Sumber : KPU Provinsi Sumatera Utara

Dari lima kandidat yang saling bertarung, pasangan Gatot Pujonugroho dan Tengku Erry Nuradi menjadi pemenang dengan meraih 33 persen atau sekitar 1.604.337. Menarik untuk dilihat adalah pada pemilu gubernur tahun 2013 ini semakin menunjukkan bahwa basis-basis etnis dan agama mempunyai peranan yang penting sebagai mesin pendulang perolehan suara. Ini mengindikasikan bahwa fungsi dari partai politik tidak berjalan sebagai akomodasi dari kepentingan masyarakat Sumatera Utara. Ada kesan bahwa para kandidat yang berkompetisi dalam pemilihan gubernur mengejar perkumpulan-perkumpulan ataupun paguyuban-paguyuban yang yang diwadahi oleh berbagai etnis dan agama untuk menjadi mesin pendulang suara yang efektif. Hal ini akan berbanding lurus dengan apa yang terjadi di kota Medan, mengingat tidak ada etnis ataupun agama yang dominan. Maka sangat wajar jika etnis dan

agama akan dijadikan sebagai mesin kekuatan politik yang mempengaruhi para pemilih.

Hal menarik untuk dicermati dalam penelitian ini adalah, bagaimana afiliasi etnis Tionghoa di Kota Medan dalam pemilihan Gubernur Sumatera pada tahun 2013? Meskipun etnis Tionghoa tidak ada yang mencalonkan diri menjadi Pasangan Gubernur maupun Wakil Gubernur Sumatera, keberadaan etnis Tionghoa di Kota Medan tetap menjadi primadona untuk mendulang basis-basis pemilihan suara. Keberadaan etnis Tionghoa sebagai etnis terbesar ketiga di Kota Medan menjadi alasan utama mengapa semua kandidat berlomba untuk mendulang suara etnis Tionghoa.

Dari ke-lima kandidat yang bertarung dalam pemilihan gubernur Sumatera Utara pada tahun 2013, etnis Tionghoa cenderung berafiliasi kepada dua pasangan kandidat yakni pasangan no urut 2 Effendi Simbolon - Jumiran Abdi, dan pasangan no urut 5 yakni Gatot Pujo Nugroho - Tengku Erry Nuradi. Berikut ini adalah rekapitulasi hasil perhitungan suara di basis-basis kantong suara etnis Tionghoa menurut pola persebaran penduduk di Kota Medan.

Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Gubernur Sumatera Utara berbasiskan pola persebaran penduduk Etnis Tionghoa di Kota Medan 2013

No	Pasangan Gubernur/ Wakil Gubernur	Perolehan Suara					
		Kecamatan Medan Kota	Kecamatan Medan Area	Kecamatan Medan. Tuntungan	Kecamatan. Medan. Maimun	Kecamatan. Medan. Baru	Kecamatan Medan. Petisah
02	Effendi Simbolon Dan Jumiran Abdi	11.362	7.739	13.412	3.198	5.355	9.300
05	H. Gatot Pujo Nugroho Dan H. Tengku Erry Nuradi	8.877	18.047	6.335	7.426	3.763	7.528

Sumber: KPU Kota Medan 2013.

Berdasarkan hasil rekapitulasi perhitungan suara di atas, dapat dilihat bahwa afiliasi pilihan etnis Tionghoa di Kota Medan memang tertuju pada dua pasangan kandidat. Hal yang menarik untuk dilihat adalah unggulnya pasangan

Effendi Simbolon – Jumiran Abdi di 4 kecamatan, yakni Kec. Medan Kota, Kec. Medan Area, Kec. Medan Tuntungan, Kec. Medan Baru, dan Kec. Medan Petisah. Praktis hanya dua kecamatan yang dimenangkan oleh pasangan Gatot Pujo Nugroho – Tengku Erry Nuradi yakni, Kec. Medan Area dan Kec. Medan Maimun.

Hasil wawancara yang dilakukan peneliti di empat kecamatan di atas memberikan sebuah sinyalemen besar bahwa sebagian etnis Tionghoa memang ingin suatu perubahan yang besar di Sumatera Utara pada umumnya, dan khususnya di Kota Medan. Etnis Tionghoa memang menginginkan sosok pemimpin yang mampu merakyat, jujur, dan mampu menuntaskan segala bentuk diskriminasi yang memang kerap dialami oleh etnis Tionghoa khususnya di Kota Medan.

Dari hasil wawancara di atas, ternyata kehadiran effendi simbolon-Jumiran Abdi yang diusung oleh partai PDI-P ternyata memberikan sebuah pengaruh besar untuk memancing gairah etnis Tionghoa untuk terlibat aktif dalam pemilihan gubernur Sumatera Utara pada tahun 2013. Secara psikologis kedekatan PDI-P dengan etnis Tionghoa sebenarnya bukanlah yang baru dalam dinamika politik di Indonesia. Setelah liberalisasi politik bergulir tahun 1998, afiliasi politik etnis Tionghoa tertuju pada dua partai politik yakni partai PIB (Partai Indonesia Baru) dan PDI-P. Sayangnya PIB tidak dapat berpartisipasi kembali pada pemilu tahun 2014, karena proses *electoral treshold* yang telah ditetapkan oleh KPU. Praktis PDI-P menjadi salah satu partai yang paling banyak dituju oleh etnis Tionghoa, meskipun beberapa partai politik seperti Gerindra, Hanura, Golkar, Nasdem juga memberikan kesempatan yang besar bagi etnis Tionghoa untuk terlibat didalam partai politik tersebut.

Kedekatan etnis Tionghoa di Kota Medan dengan PDI-P bukan tak memiliki alasan yang kuat. Bagi etnis Tionghoa, PDI-P merupakan tempat yang nyaman untuk menyampaikan aspirasi politik karena PDI-P memang memberikan secara penuh hak politik bagi etnis Tionghoa yakni hak untuk dipilih dan bukan hanya hak untuk memilih. (Antara: 06/01/13). Indikasi ini memang berbanding

lurus dengan terpilihnya 6 wakil dari etnis Tionghoa pada pemilu legislatif tahun 2009 yang duduk untuk menjadi anggota legislatif baik untuk tingkar DPRD Kota Medan, dan DPRD Provinsi Sumatera Utara, dimana 4 dari anggota legislatif tersebut merupakan dari PDI-P dan 2 berasal dari partai PIB. Oleh sebab itu, dalam pemilihan Gubernur Sumatera Utara tahun 2013 secara psikologis pilihan terbesar etnis Tionghoa tertuju kepada pasangan Effendi Simbolon dan Jumiran Abdi. Hal ini semakin diperkuat oleh argumentasi Tan Sri Candra salah satu tokoh etnis Tionghoa di Kota Medan yang secara terang-terangan mengatakan bahwa etnis Tionghoa memang akan mendukung pasangan Effendi Simbolon-Jumiran Abdi yang diusung oleh PDI-P (Waspada :06/01/2013).

Jarak antara pemilihan legislatif tahun 2014 dengan pemilihan Gubernur Sumatera Utara pada tahun 2013 ternyata memiliki pengaruh yang signifikan terhadap afiliasi politik etnis Tionghoa. Afiliasi etnis Tionghoa terhadap PDI-P didasarkan banyak perwakilan etnis Tionghoa yang mencalonkan diri baik untuk menjadi anggota DPR-D Kota Medan, DPR-D Provinsi Sumatera Utara, maupun menjadi anggota DPR-RI dari PDI-P.

Jika sebagian etnis Tionghoa melakukan afiliasi politik terhadap pasangan Effendi Simbolon dengan Jumiran Abdi berdasarkan kekerabatan etnis yang menduduki pos-pos penting di PDI-P dan kedekatan ideologis PDI-P dengan etnis Tionghoa, maka bentuk afiliasi etnis Tionghoa kepada pasangan Gatot Pujo Nughro dan Tengku Erry memiliki alasan yang berbeda. Hasil wawancara yang dilakukan dengan etnis Tionghoa yang memilih pasangan Gatot Pujo Nughro mengatakan, bahwa pada dasarnya mereka menginginkan calon yang telah memimpin Sumatera Utara periode sebelumnya. Asumsi ini didasarkan bahwa mereka telah memiliki kepercayaan bahwa Gatot Pujo Nughro sebagai calon petahan dianggap mampu menjalankan program yang memang belum terselesaikan pada masa sebelumnya.

Jika ditelisik lebih lanjut berdasarkan stratifikasi pekerjaan, bentuk afiliasi sebagian etnis Tionghoa kepada pasangan Gatot Pujo Nugroho dan

Tengku Erry dilakukan oleh etnis Tionghoa yang berprofesi sebagai pengusaha. Seperti yang dikatakan oleh Harianto alias Lim kui Widjaya,¹ bahwa mereka memilih pasangan Gatot Pujo Nugroho dan Tengku Erry berdasarkan dua alasan. *Pertama*, sosok Gatot Pujo Nugroho sebagai seorang birokrat dianggap telah memiliki pengalaman untuk menyelesaikan birokrasi yang cukup rumit di Sumatera Utara. *Kedua*, sosok Tengku Erry sebagai mantan birokrat di Kabupaten Serdang Bedagai sekaligus sebagai pengusaha dianggap memiliki kemampuan untuk menerjemahkan apa yang menjadi kebutuhan-kebutuhan bagi etnis Tionghoa yang memiliki latar belakang pengusaha.

BENTUK AFILIASI POLITIK KEKERABATAN ETNIS TIONGHOA

Pada umumnya, sistem kekerabatan etnis Tionghoa berawal dari hubungan keluarga inti dan lingkaran saudara kandung yang mempunyai silsilah dari kedua orang tua, keturunan (anak-anak), keluarga kakek dan nenek dari kedua orang tua mereka masing-masing (Mukmin Ali, B 2009: 67). Relasi sistem kekerabatan ini merupakan hasil dari proses sosialisasi seseorang dalam hidupnya, di mana dalam proses tersebut terkandung rasa saling percaya yang dapat di manfaatkan untuk mendapatkan sesuatu tujuan tertentu (Wolf dalam Ahimsa Putra 2007:10). Sistem kekerabatan yang mereka bentuk memiliki sebuah aturan-aturan ataupun adanya sebuah sanksi-sanksi jika terdapat sebuah pelanggaran. Dengan kata lain, jika ada kerabat yang bertindak tidak seperti apa yang di harapkan oleh kerabat lainnya maka ada sebuah bentuk sanksi terhadap perbuatannya (Wolf dalam Ahimsa Putra 2007:10).

Komunitas etnis Tionghoa di kota Medan masih menjunjung tinggi nilai-nilai kekeluargaan dan masih memegang tradisi negara leluhur, meskipun mereka sudah berbeda generasi. Waluyo menyebutkan dalam keluarga Tionghoa di kenal sebuah istilah *Chia* atau *Chi-Thing*, di mana komposisi keluarga dalam masyarakat Tionghoa di bedakan menjadi tiga kelompok

¹ Wawancara dengan Harianto alias Lim Kui Widjaya. Harianto merupakan seorang pengusaha dibidang jasa pengiriman barang-barang ekspor-impor. Wawancara dilakukan pada tanggal 27 Februari 2014 pukul 10.00 WIB.

(Waluyo 2006;38). *Pertama* adalah keluarga inti atau utama. Keluarga inti adalah keluarga yang terdiri atas suami dan anak yang di sebabkan adanya proses perkawinan. *Kedua* adalah keluarga pelindung yang terbentuk dari adanya sebuah kesatuan keluarga yang terdiri dari orang-orang tua ataupun dari kakek/nenek mereka. *Ketiga* adalah keluarga besar dari garis keturunan yang terdiri dari empat atau lima generasi.

Pada awalnya sistem kekerabatan etnis Tionghoa perantauan masih mengikuti gaya kekerabatan dari negara leluhur (China) yang mengakui garis keturunan dari keturunan laki-laki, sehingga garis keturunan dari pihak ibu merupakan pihak luar (Suryadinata 1984: 170). Etnis Tionghoa yang berada di Medan saat ini mayoritas Tionghoa yang sudah mengalami peranakanisasi. Sistem kekerabatan yang di anut oleh kaum peranakan ternyata mengalami pergeseran dari apa yang menjadi warisan kaum Totok pada masa sebelumnya.

Dalam pemilihan Gubernur Sumatera Utara tahun 2013 bentuk afiliasi etnis Tionghoa terlihat dengan menggunakan beberapa model kekerabatan. *Pertama*, Afiliasi Politik etnis Tionghoa yang terbangun berdasarkan sesama pengusaha. Dalam hal ini, jejaring kekerabatan pengusaha etnis Tionghoa yang ada di Kota Medan cenderung melakukan afiliasi kepada dua pilihan politik yakni kepada pasangan Effendi Simbolon-Jumiran Abdi dan Pasangan Gatot Pujo Nugroho- Tengku Erry Nuradi. Jika dilihat secara kasat mata, memang etnis Tionghoa tidak secara terang-terangan mengatakan bentuk dukungannya. Maklum saja, etnis di Kota Medan ingin dilihat netral dan tidak terbagi kedalam blok-blok politik tertentu. Hanya saja, hasil wawancara yang dilakukan dengan beberapa etnis Tionghoa membuktikan bahwa afiliasi dari kalangan pengusaha etnis Tionghoa memang nyata diberikan. Seperti yang disampaikan oleh Abeng,² bahwa biasanya sesama pengusaha itu memiliki jaringan yang kuat dalam melakukan usaha bisnis, dan dalam pemilihan Gubernur Sumatera Utara tahun 2013 afiliasi politik etnis Tionghoa memang tertuju kepada dua pasangan

² Wawancara dilakukan dengan Abeng pada tanggal 27 Februari 2014 pukul 14.00 WIB. Abeng merupakan pengusaha yang bergerak dalam bidang Properti.

yakni pasangan Effendi Simbolon-Jumiran Abdi dan pasangan Gatot Pujo Nughroho Tengku Erry.

Kedua adalah afiliasi politik etnis Tionghoa yang dibangun berdasarkan kekerabatan sesama organisasi. Heterogenitas Tionghoa yang ada di Medan memunculkan sebuah kekuatan politik yang berbentuk sebuah perkumpulan ataupun berupa paguyuban. Hal ini merupakan keuntungan tersendiri bagi beberapa kandidat yang saling berkompetisi untuk mendapatkan legitimasi basis pendukungnya. Dengan menggunakan beberapa paguyuban ataupun perkumpulan etnis setidaknya hal ini akan mempermudah partai politik untuk mengembangkan mekanisme solidaritas dengan menggunakan bahasa, simbol-simbol. Jejaring paguyuban, termasuk hubungan-hubungan patron klien etnis, relatif tersedia dan mudah digunakan untuk penggalangan politik atau dengan kata lain penggunaan sarana etnis, jaringan komunikasi dan komponen-komponen sentimental etnis dapat dieksploitisir dalam usaha penggalangan kekuatan politik untuk kepentingan pemilihan gubernur Sumatera Utara.³ Jejaring beberapa paguyuban etnis ternyata mempunyai peranan baru sebagai kelompok kepentingan politik.

Dalam pemilihan Gubernur Sumatera Utara, organisasi-organisasi etnis Tionghoa yang paling menonjol yang menjadi basis penentuan politik dari tokoh Tionghoa adalah Organisasi INTI ataupun PSMTI. Hampir semua etnis Tionghoa Medan mengatakan bahwa perkumpulan ini bukanlah organisasi yang bersifat politik akan tetapi bertujuan kepada tindakan-tindakan sosial. Tetapi tidak bisa dipungkiri bahwa dalam perhimpunan ini sering terjadi manuver-manuver untuk menentukan arah dan sikap dari politik Tionghoa.

PENUTUP

Trend penggunaan politik etnis, terjadi dalam dinamika politik di Kota Medan. Karakter kota Medan yang tidak memiliki mayoritas etnis memang memberikan sumbangan besar bahwa masing-masing etnis yang berada di Kota

³ Usman Pelly, "Mengapa Harus Jawa dan Batak Toba" *Waspada*, 27 Maret 2008.

Medan saling menunjukkan eksistensinya sebagai upaya mempertahankan identitas etnis masing-masing.

Bagi etnis Tionghoa yang berada di Medan, muncul sebuah upaya yang sama seperti apa yang dilakukan etnis lain pada umumnya, dimana penggunaan instrumen etnis sebagai pergerakan politik. Setelah dicabutnya kebijakan-kebijakan yang mengekang hak-hak politik mereka, etnis Tionghoa di Medan mulai menggalang sarana-sarana politik seperti membentuk partai politik yang berbasiskan etnis dan mulai mengembangkan instrumen politik etnis. Hal itu dapat dilihat dari penggunaan sistem kekerabatan seperti kekerabatan yang terbangun karena adanya kesamaan profesi (pengusaha), kesamaan agama maupun adanya kesamaan suku. Sistem ini ternyata mampu dikonversi dengan baik sebagai alat untuk memobilasi kalangan etnis Tionghoa, sehingga efek yang muncul dari penggunaan sistem kekerabatan ini adalah politik kekerabatan. Sistem kekerabatan ini akan berguna menjadi penetralisir jika terjadi kegamangan di dalam komunitas etnis Tionghoa yang berada di akar rumput serta menjadi patron untuk menentukan pilihan politiknya.

Dalam pemilihan Gubernur Sumatera Utara tahun 2013 afiliasi politik etnis Tionghoa tertuju kepada dua pasangan kandidat yakni pasangan Effendi Simbolon-Jumiran Abdi dan Gatot Pujo Nugroho-Tengku Erry Nuradi. Afiliasi politik etnis Tionghoa dalam pemilihan gubernur Sumatera Utara terpola kepada faktor kedekatan ideologi partai politik dan persebaran etnis Tionghoa yang menduduki partai politik tersebut. Bagi etnis Tionghoa di Kota Medan, PDI-P menjadi rumah politik yang ramah dan hadirnya sejumlah elit politik etnis Tionghoa yang duduk menjadi anggota dewan berasal dari PDI-P semakin memberikan kenyamanan bahwa mereka mendapatkan hak-hak politiknya. Selain kepada pasangan Effendi Simbolon-Jumiran Abdi, afiliasi politik etnis Tionghoa di Kota Medan juga tertuju kepada pasangan Gatot Pujo Nugroho-Tengku Erry Nuradi meskipun dukungan yang diberikan etnis Tionghoa tidak terlalu besar seperti yang mereka lakukan untuk pasangan Effendi Simbolon dan Jumiran Abdi.

DAFTAR PUSTAKA

- Indonesia; Local Strongmen dan Roving Bandits” dalam *Malaysian Journal of History, Politics, Strategis Studies*. vol 37, hal 92.
- Ahimsa-Putra,H.S. 2007. *Patron dan Klien di Sulawesi Selatan*. Kepel Press, Yogyakarta.
- Ali Mukmin, Budi, Ahmad Husni Mubarak dan Muhammad Ali Azhar; *Desentralisasi dan Konflik Kewenangan (Studi Kasus Konflik antara Pemprov Sulawesi Tenggara dengan Pemkot Kendari tentang Investasi PT. Arta Graha Group)*. Makalah Seminar Internasional ke 8 Percik, Salatiga, Jawa Tengah Tahun 2007.
- Baswedan, A. 2007. Sebuah Pengantar dalam *Politik Lokal di Indonesia*. Yayasan Obor dan KITLV, Jakarta.
- Cohen, A. 1996. “Etnicity and Politics”. dalam *Etnicity*. J.Hutchinson dan A.D. Smith (ed). Oxford University Press. New York.
- _____. 2004. “Introductions The Lesson of Etnicity” dalam *Urban Etnicity*. A. Cohen. Routledge. London.
- _____. 1969. *Custom and Politics In Urban Africa*. Routledge. London.
- Gaffar, A. 1999. *Politik Indonesia Transisi Menuju Demokrasi*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Habib, A. 2004. *Konflik Antar Etnik di Pedesaan, Pasang Surut Hubungan Cina-Jawa*. LKIS, Yogyakarta.
- Hadiz, R.V. 2005 . *Dinamika Kekuasaan Ekonomi Politik Indonesia Pasca-Soeharto*. LP3ES, Jakarta.
- _____. 2003. “ Power and Politics in North Sumatra : The Uncompleted Reformasi “ dalam *Local Power and Politics in Indonesia*. Institute of Southeast Asian Studies. Singapore.
- Halking dan Ali Mukmin Budi. 2013. *Bahan Ajar Ilmu Politik*. Universitas Negeri Medan. Medan.
- Hidayat, S. 2007. “Shadow State Bisnis dan Politik di Provinsi Banten” dalam *Politik Lokal di Indonesia*. Yayasan Obor dan KITLV, Jakarta.
- Mukmin, Ali Budi. 2009. *Politik Etnis Tionghoa di Kota Medan*. Tesis Pascasarjana Ilmu Politik. Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.
- Nuryanti, S. 2007. “Kinerja DPRD Medan dan Simalungun“ dalam *Partai dan Parlemen Lokal Era Transisi Demokrasi di Indonesia*. LIPI, Jakarta.
- Suparlan, P. 1989. “Antropologi Politik : Pendekatan dan Ruang Lingkup”. dalam *Jurnal Ilmu Politik 5*. AIPI dan LIPI. PT Gramedia, Jakarta.

- Surbaki Ramlan. 2007. *Memahami Ilmu Politik*. Gramedia Widiasarana Indonesia. Jakarta.
- Suryadinata, L.1984. *Dilema Minoritas Tionghoa*. Grafiti Pers, Jakarta.
- _____. 2002. *Negara dan Etnis Tionghoa*. LP3ES, Jakarta.
- _____. 1986. *Pribumi Indonesias, the Chinese Minority and China*. Heinemann Asia, Singapore.
- _____.1976. *Peranakan Chinese Politics in Java 1917-1942*. Singapore, University Press.
- _____.2001. “Chinese Politics in Post-Suharto’s Indonesia : Beyond the Ethnic Approach”. *Asian Survey Singapore* vol.3:503-505.
- _____. 2003. “Kebijakan Negara Indonesia Terhadap Etnik Tionghoa : Dari Asimilasi ke Multikulturalisme” dalam *Indonesian Journal Of Social and Cultural Anthropology* vol.71: 1.
- _____. 1990. “Indonesia-China Relations : A Recent Breakthrough” dalam *Asian Survey* vol. 7 (30) : 682-696.
- Tan, G.M. 1976. “Masalah Mayoritas-Minoritas Tionghoa di Indonesia”. *Prisma* vol. 8:25-26.
- Pelly, U. 1994. ”Masalah Asimilasi Keturunan Cina : Sebuah Gugatan Sosio Kultural”. *Analisis CSIS* vol. 1:55-57.
- Waluyo, 2007. *Dari Kebun ke Pasar*. Tesis Pascasarjana Program Ilmu Sejarah. UGM, Yogyakarta.

Media internet

Etnis Tionghoa Nilai PDI-P merupakan partai yang nyaman. 06/01/2013. Sumber <http://www.antarasumbar.com/berita/nusantara/d/22/265279/etnis-tionghoa-nilai-pdi-perjuangan-partai-nyaman.html>// didownload tanggal 7 April 2014.

“Etnis Tionghoa menilai PDI-P partai nyaman. Sumber http://www.waspada.co.id/index.php?option=com_content&view=article&id=274227:etnis-tionghoa-nilai-pdip-partai-nyaman&catid=41:pilkada-sumut&Itemid=94, di doanload tanggal 7 April 2014.